



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUSANTI DEWI**
2. Jabatan : **KEPALA SEKSI PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INTERNAL I PADA
DIREKTORAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI PERBENDAHARAAN**
3. NHK : **989472**

II. DATA HARTA

- A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **1.080.000.000**
1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/21 m2 di KAB / KOTA LEBAK, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
 2. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
 3. Tanah Seluas 96 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
 4. Tanah dan Bangunan Seluas 14 m2/28 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
 5. Tanah Seluas 110 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
- B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. **250.000.000**
1. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
 2. MOBIL, SUZUKI SPRESSO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
- C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. **10.000.000**
- D. SURAT BERHARGA** Rp. **---**
- E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **386.700.000**
- F. HARTA LAINNYA** Rp. **450.000.000**



Sub Total	Rp.	2.176.700.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.176.700.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.